

OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MELALUI KERJA SAMA DENGAN DU/DI

Oleh:

Drs. Widarto, M.Pd.

Dosen Fakultas Teknik UNY Yogyakarta

A. Pendahuluan

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia selama ini, seperti halnya sekolah-sekolah yang lain, perkembangannya mengalami pasang dan surut. Keberadaan SMK, sebagaimana yang kita ketahui, dirancang untuk menyiapkan lulusannya untuk terjun langsung ke pos-pos kerja di masyarakat. Pada suatu ketika mungkin SMK mengalami keadaan pasang; dalam arti kehadirannya amat didambakan oleh masyarakat dan lulusannya pun banyak yang langsung terserap di dunia kerja. Pada saat yang lain sekolah yang menyiapkan lulusannya menjadi tenaga kerja terampil menengah (*middle skilled worker*) ini kehadirannya diremehkan oleh masyarakat dan lulusannya pun banyak yang menjadi penganggur.

Untuk lebih memberikan keadaan yang lebih bermakna bagi masyarakat luas, seperti yang didambakan masyarakat dan para lulusannya pun dapat langsung diserap oleh dunia kerja maka secara sistemik dan berkelanjutan perlu dilakukan pembenahan terhadap penyelenggaraan SMK. Di dalam upaya pembenahan inilah SMK, bisa mengkaji berbagai kemungkinan, dan salah satu alternatifnya adalah optimalisasi penyelenggaraan pendidikan melalui kerja sama dengan Dunia Usaha/Dunia Industri, baik yang menyangkut konsepsi maupun implementasinya.

B. Kondisi Umum SMK

Masyarakat Indonesia sekarang ini sedang berada dalam masa transisi dari masyarakat agraris atau masyarakat pra-industri (*pre-industrial society*) menuju kepada terciptanya masyarakat industri (*industrial society*). Masa transisi ini ditandai dengan semakin banyaknya sektor kerja yang memerlukan keterampilan *vokasional* secara spesifik, yaitu keterampilan yang di dalamnya mengandung kecakapan teknologi tertentu.

Sesuai konsep pengembangan pendidikan kejuruan umumnya dan SMK pada khususnya, yaitu menyiapkan lulusan yang memiliki keterampilan *vokasional*

tertentu, maka sebenarnya kehadiran SMK dalam masa transisi tersebut justru semakin diperlukan.

Dalam bahasa yang sederhana, kehadiran SMK sekarang ini justru semakin didambakan masyarakat; utamanya masyarakat yang berkecimpung langsung dalam dunia kerja. Dengan catatan, bahwa lulusan pendidikan kejuruan memang mempunyai kualifikasi sebagai (calon) tenaga kerja yang memiliki keterampilan *vokasional* tertentu sesuai dengan bidang keahliannya.

Seperti diketahui, di dalam dua tiga dasa warsa terakhir ini perkembangan teknologi itu berjalan dengan amat cepat. Teknologi yang di hari kemarin masih dianggap modern (*sunrise technology*) bukan tak mungkin hari ini sudah mulai basi (*sunset technology*). Teknologi komputer misalnya; beberapa tahun lalu orang memakai komputer yang fisiknya besar dan sulit dipindahtempatkan manakala diperlukan. Selanjutnya orang memilih komputer *portabel* yang mudah dipindah ke mana-mana; dan hari ini orang memilih komputer dompet yang dapat dibawa ke mana-mana. Dari sisi perangkat lunak pun begitu pula; beberapa waktu lalu orang menggunakan program WS-2000 untuk keperluan tulis menulis, kemudian pindah ke WS-4, pindah lagi ke WS-6, sebelum akhirnya ke WS-7. Sekarang bahkan banyak orang yang tidak mau lagi memakai Program WS karena ada teknologi baru yang dianggap lebih *sophisticated*.

Oleh karena perkembangan teknologi, yang berimplikasi pada pembekalan keterampilan *vokasional* kepada siswa SMK, itu berjalan dengan cepat maka menurut Supriyoko (2000) ada beberapa prinsip penyelenggaraan pendidikan kejuruan yang harus diperhatikan. Adapun beberapa prinsip yang dimaksud antara lain adalah sebagai berikut.

1. Pendidikan kejuruan harus dapat dilaksanakan secepat mungkin (*education in short*).
2. Pendidikan kejuruan dalam pengembangannya harus berorientasi kepada jenis-jenis pekerjaan yang dibutuhkan di lapangan (*orientation*).
3. Pendidikan kejuruan diatur sedemikian rupa supaya siswa dapat keluar dan masuk lembaga pendidikan secara mudah (*free entry exit*).
4. Pengembangan pendidikan kejuruan harus terbuka atas terjadinya interaksi antar disiplin ilmu serta disiplin teknologi (*cross discipline*).

5. Apa pun yang dilakukan pendidikan kejuruan harus disesuaikan dengan permintaan pasar (*demand driven*), bukan pasar yang harus menyesuaikan pendidikan kejuruan.
6. Pendidikan kejuruan haruslah berani mengembangkan teknologi yang sedang dan akan berkembang (*forward technology*).

Keenam prinsip penyelenggaraan pendidikan kejuruan tersebut tidak sepenuhnya dapat dipenuhi di dalam kasus pengembangan SMK di Indonesia sekarang ini. Mengenai pelaksanaan pendidikan kejuruan yang harus secepat mungkin misalnya; karena pelaksanaan SMK di Indonesia terpaku pada struktur kurikulum yang kaku maka proses penyelesaian pendidikan itu baru dapat dilaksanakan setelah siswa menyelesaikan kurikulum. Akibatnya, untuk menyelesaikan program keterampilan *vokasional* tertentu di bidang permesinan, misalnya untuk menjadi seorang yang sanggup menguasai mesin bubut dasar (*basic lathe machine*) harus menunggu tiga tahun. Pada hal keterampilan *vokasional* tersebut akan segera dipakai untuk mengambil pekerjaan (*job*) di lapangan.

Bagi masyarakat, belajar di SMK sekarang ini menjadi tidak mudah karena banyak urusan yang harus diselesaikan; baik urusan yang sifatnya administratif maupun urusan "tetek bengek" yang lainnya. Prinsip "*education in short*" sama sekali tidak berlaku dan yang berkembang justru prinsip "*education in complexity*", pendidikan yang kompleks.

Dalam hal pengembangan disiplin ilmu juga demikian halnya. Meskipun sekarang ini sudah ada pembauran antar Kelompok Keahlian di SMK, misalnya saja pada satu SMK Kelompok Teknologi dan Industri (TI) bersama dengan Kelompok Bisnis dan Manajemen (BM), Kelompok Pariwisata (PW) bersama dengan Kelompok Seni dan Kerajinan (SK), dan sebagainya, tetapi disiplin ilmu dan teknologi yang berkembang pada masing-masing kelompok tidak dapat saling berinteraksi. Padahal, disiplin ilmu dan teknologi TI memerlukan interaksi dengan BM, PW dengan SK, dan lainnya. Di dalam hal ini prinsip "*cross discipline*" tidak berjalan efektif dan yang terjadi di lapangan justru prinsip "*school box*" yang membatasi kelompok-kelompok yang sulit ditembus dari luar.

SMK di Indonesia memang sekarang ini sedang "naik daun". Kebijakan pemerintah dengan program merubah proporsi SMA : SMK semula 60 : 40 menuju 40 : 60 disambut hingar bingar para pelaku di SMK. Sehingga saat ini SMK di

Indonesia sempat menjadi isu publik, meskipun pengertian publik di sini sangat terbatas pada kalangan orang tua dan praktisi pendidikan kejuruan khususnya dan praktisi pendidikan menengah pada umumnya.

Dengan adanya isu tersebut, banyak praktisi pendidikan yang ramai-ramai mendirikan SMK dan menggenjot jumlah siswa SMK di daerah-daerah.

C . Kebijakan Teknis

Di samping masalah prinsip seperti tersebut di atas terdapat kebijakan teknis yang ketika dioperasionalkan di lapangan mengalami deviasi yang serius. Kebijakan teknis yang dimaksud antara lain menyangkut kurikulum, uji kompetensi dan sertifikasi, serta masalah akreditasi sekolah.

Sekarang ini SMK di Indonesia (seharusnya) mengaplikasikan KTSP. Upaya Depdiknas mengembangkan kurikulum pendidikan kejuruan yang mengakomodasi potensi yang ada di luar sekolah memang pantas diakui; namun demikian banyak hal yang dalam operasionalnya bertentangan dengan kaidah pendidikan sehingga hasilnya jauh dari harapan, bahkan tidak produktif sama sekali. Sebagai misal, siswa SMK yang sedang melaksanakan Praktek Industri (PI) diijinkan untuk tidak mengikuti aktivitas di dalam kelas (*indoor activity*), termasuk ulangan harian dan ujian semester atau catur wulan. Idenya cukup bagus karena kesempatan menggali ilmu dan keterampilan di dunia kerja haruslah dimanfaatkan secara optimal, akan tetapi hal ini ternyata memunculkan kekacauan dalam sistem administrasi sekolah. Banyak siswa yang tidak dapat nilai di sekolah karena harus menyelesaikan PI-nya; ironisnya siswa yang PI-nya bagus justru nilai sekolahnya rendah.

Penerapan kurikulum SMK sendiri masih menggunakan paradigma lama yang sudah kadaluwarsa; yaitu memandang bahwa tanpa dengan meningkatkan profesionalisme guru pun, dengan memberikan sedikit "ancaman" kepada kepala sekolah, kurikulum bisa dijalankan di lapangan. Keadaan tersebut jelas tidak produktif. Buktinya, sekarang ini sudah akhir tahun 2008 tetapi masih banyak sekolah yang belum menjalankan KTSP secara benar. Banyak sekolah yang sudah menjalankan kurikulum terbaru, para guru sekedar menjalankan kurikulum secara fisik di dalam arti tidak disertai dengan semangat yang mendasari disusunnya kurikulum tersebut.

Tentang uji kompetensi demikian pula halnya. Munculnya ide uji kompetensi sebenarnya adalah kegiatan yang dibuktikan dengan sertifikat keterampilan atau

keahlian untuk lebih meyakinkan dunia kerja mengenai keterampilan *vokasional* yang dikuasai oleh lulusan SMK. Ide ini muncul dikarenakan dalam realitasnya banyak lembaga kerja yang tidak percaya akan validitas ijazah atau STTB yang dimiliki oleh kebanyakan para lulusan SMK. Dengan demikian uji kompetensi sifatnya alternatif dan hukumnya "sunnah"; maksudnya bagi sekolah yang validitas ijazah lulusannya telah dipercayai oleh dunia kerja boleh saja siswanya tidak mengambil uji kompetensi.

Apa yang terjadi sekarang ini? Di dalam pelaksanaannya di berbagai daerah, uji kompetensi itu sifatnya utama serta hukumnya "wajib". Para siswa yang mengikuti uji kompetensi ini diharuskan membayar dalam jumlah yang seringkali sangat memberatkan untuk ukuran kebanyakan siswa dan orang tua siswa. Bagi banyak kepala sekolah, guru dan siswa, uji kompetensi berubah menjadi "momok" yang menakutkan; itupun sertifikat yang diperoleh siswa terkadang tidak memberikan benefit karena tidak dipercaya dunia kerja.

Melihat realitas tersebut di atas maka konsep dan operasionalisasi uji kompetensi harus ditinjau ulang, meskipun hal ini belum dilaksanakan secara melembaga. Perlu dibentuk tim yang mengkaji pelaksanaan uji kompetensi secara objektif untuk mengambil kesimpulan yang tidak salah.

Selanjutnya mengenai akreditasi sekolah juga diperoleh kasus yang serupa. Paradigma yang digunakan untuk mengakreditasi SMK masih menggunakan paradigma klasik yang feodaistik. Dalam paradigma ini menganggap sekolah swasta sebagai sekolah kelas dua dan hanya sekolah swastalah yang pantas diakreditasi. Padahal banyak pula SMK negeri yang berkualitas rendah. Logika seperti ini sulit diterima oleh akal sehat dan bertentangan dengan semangat reformasi pendidikan yang baru kita bangun.

D. Optimalisasi Penyelenggaraan Pendidikan melalui Program Coop

Menjawab dua prinsip terakhir penyelenggaraan pendidikan seperti yang ditawarkan Supriyoko, yakni : (1) Pendidikan kejuruan harus disesuaikan dengan permintaan pasar (*demand driven*), bukan pasar yang harus menyesuaikan pendidikan kejuruan; dan (2) Pendidikan kejuruan haruslah berani mengembangkan teknologi yang sedang dan akan berkembang (*forward technology*), maka salah satu alternatifnya adalah optimalisasi penyelenggaraan pendidikan melalui kerja sama dengan Dunia Usaha/Dunia Industri, baik yang menyangkut konsepsi maupun

implementasinya. Selain meneruskan pola-pola yang selama ini masih dinilai efektif, ada satu pola lagi yang perlu dikembangkan yakni *Cooperative Learning Program*. Yang selanjutnya disebut Program Coop.

Konsep Program Coop adalah sedikit lebih tinggi dari Praktek Kerja Industri yang selama ini telah dilakukan. Program ini menempatkan siswa SMK tingkat akhir di Dunia Kerja dan oleh Dunia Kerja diperlakukan sebagaimana karyawan perusahaan tersebut. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab siswa "sama" dengan karyawan pada umumnya yang selevel.

Implementasi Program Coop, karena siswa SMK pada dasarnya masih belajar, maka hendaknya ditempatkan di bagian yang beresiko rendah, pekerjaan sederhana, atau sebagai asisten pekerjaan tertentu.

Keuntungan Program Coop bagi siswa/sekolah :

1. Siswa merasakan situasi kerja riil, tidak hanya melihat/mengamati
2. Siswa mendapatkan "bayaran" yang sewajarnya
3. Siswa mendapatkan surat keterangan pengalaman kerja
4. Siswa mendapatkan peluang kerja di tempat yang sama setelah lulus
5. Sekolah memperoleh gambaran riil situasi kerja industri
6. Sekolah mendapat informasi kemauan dunia kerja
7. Sekolah bisa menghemat biaya praktek
8. Terjalin hubungan sinergis yang bersifat simbiosis mutualisme
9. Dll.

Keuntungan Program Coop bagi industri :

1. Memperoleh tenaga kerja murah, sama seperti karyawan masa percobaan
2. Mendapatkan karyawan yang taat
3. Tidak ada istilah PHK
4. Tidak perlu memberikan pesangon
5. Bisa mencangkok siswa yang potensi
6. Dll.

E. Penutup

Dari deskripsi tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan kejuruan dalam konteks SMK perlu dioptimalkan Oleh karena itu rekomendasi umum makalah ini ialah semua yang terlibat dalam penyelenggaraan SMK di Indonesia hendaknya senantiasa dapat melaksanakan prinsip penyelenggaraan pendidikan kejuruan secara penuh supaya kualitas SMK di Indonesia dapat ditingkatkan secara nyata.

Pada akhirnya, rekomendasi teknis makalah ini dapat diidentifikasi dalam beberapa butir sbb: (1) segera ditata kembali sistem penyusunan dan operasionalisasi kurikulum SMK, (2) segera dikaji ulang pelaksanaan uji kompetensi dan sistem sertifikasinya, serta (3) perlu mengimplementasikan Program Coop di masing-masing sekolah dan DU/DI sesuai karakteristik masing-masing.

*****W*****